

**IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENGEMBANGAN PERMUKIMAN
BERDASARKAN RENCANA TATA RUANG WILAYAH (RTRW)
DI KECAMATAN PADANG TIMUR KOTA PADANG**

SKRIPSI

*Diajukan guna memenuhi salah satu persyaratan memperoleh gelar Sarjana
Pada Jurusan Ilmu Administrasi Negara Universitas Negeri Padang*



Oleh:
SHUEIE AEIRA PUTRI
NIM. 18042198/2018

**DEPARTEMEN ILMU ADMINISTRASI NEGARA
FAKULTAS ILMU SOSIAL
UNIVERSITAS NEGERI PADANG
2022**

PERSETUJUAN UJIAN SKRIPSI

Judul : Implementasi Kebijakan Pengembangan Permukiman
berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) di
Kecamatan Padang Timur Kota Padang

Nama : Shufie Afira Putri

NIM / TM : 18042198/2018

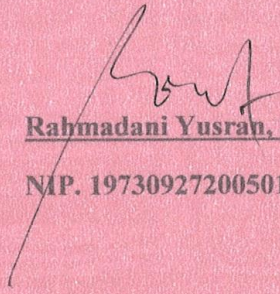
Program Studi : Ilmu Administrasi Negara

Departemen : Ilmu Administrasi Negara

Fakultas : Ilmu Sosial

Padang, 15 November 2022

Disetujui oleh
Pembimbing,


Rahmadani Yusran, S.Sos., M.Si

NIP. 197309272005011004

HALAMAN PENGESAHAN LULUS UJIAN SKRIPSI

Dinyatakan lulus setelah dipertahankan di depan tim penguji Skripsi

Departemen Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial

Universitas Negeri Padang




Pada hari Selasa 15 November 2022 Pukul 09:00 WIB s/d 10:00 WIB.

**Implementasi Kebijakan Pengembangan Permukiman berdasarkan
Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) di Kecamatan Padang Timur
Kota Padang**

Nama : Shufie Afira Putri
TM/NIM : 2018/18042041
Program Studi : Ilmu Administrasi Negara
Departemen : Ilmu Administrasi Negara
Fakultas : Ilmu Sosial

Padang, 15 November 2022

Tim Penguji:

	Nama	Tanda Tangan
Ketua	: Rahmadani Yusran, S.Sos., M.Si	1. 
Anggota	: Prof. Dasman Lanin, M.Pd., Ph.Z	2. 
Anggota	: Dr. Hasbullah Malau, S.Sos, M.Si	3. 

**Mengesahkan
Dekan FIS UNP**



Dr. Siti Fatimah, M.Pd, M.Hum
NIP. 19610218 198403 2 001

SURAT PERNYATAAN TIDAK PLAGIAT

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Shufie Afira Putri
NIM/TM : 18042198/2018
Program Studi : Ilmu Administrasi Negara
Departemen : Ilmu Administrasi Negara
Fakultas : Ilmu Sosial

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang berjudul **“Implementasi Kebijakan Pengembangan Permukiman Berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) di Kecamatan Padang Timur Kota Padang”** adalah benar dan merupakan hasil karya asli saya, kecuali kutipan yang disebutkan sumbernya. Apabila ada kesalahan dan kekeliruan dalam skripsi ini sepenuhnya merupakan tanggung jawab saya sebagai penulisnya.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Padang, 21 November 2022
Saya yang menyatakan,



Shufie Afira Putri
NIM.18042198

ABSTRAK

Shufie Afira Putri
18042198

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENGEMBANGAN PERMUKIMAN BERDASARKAN RENCANA TATA RUANG WILAYAH (RTRW) DI KECAMATAN PADANG TIMUR KOTA PADANG

Kota Padang adalah salah satu kota di Indonesia yang mengalami kepadatan penduduk. Menurut Badan Statistik Sumatera Barat (2021), Kota Padang menjadi kota terpadat ke-1 di Sumatera Barat. Jumlah penduduk di Kota Padang pada tahun 2021 yaitu sebanyak 913.448 jiwa. Berdasarkan data tersebut, dapat disimpulkan bahwa Kota Padang telah mengalami pertumbuhan dan kepadatan penduduk yang pesat sekarang ini. Berdasarkan data tersebut, dapat disimpulkan bahwa Kota Padang telah mengalami pertumbuhan dan kepadatan penduduk yang pesat sekarang ini. Dalam hal ini, Pemerintah Kota Padang mengeluarkan Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 3 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah 2010-2030. Penelitian ini membahas mengenai implementasi Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 3 Tahun 2019 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dalam Pengembangan Sistem Permukiman di Kecamatan Padang Timur Kota Padang, faktor pendukung dan faktor penghambat implementasi Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 3 Tahun 2019 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dalam Pengembangan Sistem Permukiman di Kecamatan Padang Timur Kota Padang. Data dikumpulkan melalui wawancara dan dokumentasi yang diuji keabsahannya menggunakan triangulasi data sumber, kemudian analisis data dilakukan dengan teknik reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Penelitian ini menemukan bahwa implementasi Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 3 Tahun 2019 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Padang 2010-2030 dalam pengembangan sistem permukiman di Kecamatan Padang Timur Kota Padang dilakukan dengan penyebarluasan informasi penataan ruang kepada masyarakat, adanya izin pemanfaatan ruang dan musrenbang sebagai wadah penyampaian aspirasi masyarakat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi peraturan daerah tersebut belum terlaksana sebagaimana mestinya yakni pelaksanaan penyebarluasan informasi penataan ruang kepada masyarakat yang belum terlaksana secara merata dan tingkat kesadaran dan tanggung jawab masyarakat yang masih rendah. Implementasi ini dapat berjalan karena adanya faktor pendukung berupa sumberdaya yang kompeten dan fasilitas yang memadai. Serta faktor penghambat berupa; sumberdaya manusia yang terbatas dalam pelaksanaan kebijakan, terbatasnya dana yang tersedia dan peningkatan jumlah penduduk.

Kata kunci: Implementasi, kebijakan, Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW), Kota Padang

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Warrahmatullahi Wabarakatuh

Alhamdulillah rabbil'alamin. Puji dan syukur penulis ucapkan kepada Allah SWT telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul Implementasi Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 3 Tahun 2019 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Padang 2010-2030 dalam Pengembangan Sistem Permukiman di Kecamatan Padang Timur Kota Padang. Penulisan skripsi ini bertujuan untuk melengkapi sebagian persyaratan guna memperoleh gelar Sarjana Strata Satu (S1) pada Jurusan Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Padang.

Terwujudnya penulisan skripsi ini tidak lepas dari bantuan berbagai pihak yang telah mendorong dan membimbing, baik ide, tenaga maupun pemikiran penulis dalam penyelesaian skripsi ini. Oleh karena itu, penulis ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada yang terhormat:

1. Bapak Prof. Ganefri, M.Pd., Ph.D Rektor Universitas Negeri Padang.
2. Ibuk Dr. Siti Fatimah, M.Pd., M.Hum. Dekan Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Padang.
3. Bapak Aldri Frinaldi, SH, M.Hum Ph.D. Selaku Sekretaris Jurusan Ilmu Administrasi Negara, Universitas Negeri Padang.
4. Bapak Rahmadani Yusran, S.Sos., M.Si. Selaku Dosen Pembimbing yang telah meluangkan waktu, tenaga dan pikiran dalam memberikan bimbingan,

arahan serta saran kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini.

5. Bapak Prof. Dasman Lanin, M.Pd. Ph.D. Selaku dosen penguji I yang telah memberikan kritik, saran dan masukan yang berguna bagi penyelesaian skripsi.
6. Bapak Dr. Hasbullah Malau. S.Sos, M.Si. Selaku dosen penguji II yang telah memberikan kritik, saran dan masukan yang berguna bagi penyelesaian skripsi.
7. Bapak dan Ibu Dosen staf pengajar Jurusan Ilmu Administrasi Negara sebagai inspirasi penulis serta memberikan pelajaran dan pengalaman kepada penulis.
8. Staff karyawan dan karyawan perempuan keputakaan dan staff administrasi Jurusan Ilmu Administrasi Negara dan staff Administrasi Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Padang.
9. Bapak Indra Saputra, ST., MT, MSc selaku Kasubid Perencanaan dan Pendanaan Bappeda Kota Padang.
10. Bapak Hafiz Maulana, ST., M.T selaku Bidang Kawasan Permukiman Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (PerKim) Kota Padang.
11. Bapak Wahyudi Agustian, S.T selaku Bidang Pemetaan dan Tata Ruang Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kota Padang.
12. Ibu Silva Okhsara, S.STP selaku Kasi Perizinan dan Pendapatan Kecamatan Padang Timur

13. Bapak/Ibu lainnya yang menjadi informan dalam penelitian yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah membantu dalam penyelesaian data skripsi ini.
14. Teristimewa kepada Ayahanda Alm. Afrurizal terima kasih telah memberikan kasih sayang, selalu mendoakan, mengajarkan banyak hal dan memberikan support kepada penulis selama ayah ada.
15. Teristimewa juga kepada Ibunda Ramester terimakasih banyak telah selalu mendoakan, memberikan kasih sayang yang tak terhingga dan terimakasih atas semua hal yang telah diberikan.
16. Kepada Abangku Ihsan Suci Satria yang telah menjadi support system penulis dan telah menjadi rumah untuk kembali disaat gundah serta terima kasih untuk setiap tetesan keringat yang dikorbankan demi menguliahkan penulis. Kepada Abangku Ikhlas Mulya terimakasih telah memberikan semangat dalam menjalani kehidupan dan terima kasih juga atas bantuanmu dalam memberikan traktiran semasa perkuliahan penulis. Kepada Adikku satu-satunya Allathifa Afira Putri, terimakasih telah membuat hidup penulis selalu berwarna.
17. Terimakasih juga kepada teman-teman Kos Aspi Todak yang telah menjadi rumah kedua bagi penulis.
18. Semua teman-teman IAN angkatan 18 yang tidak bisa saya sebutkan satupersatu, yang masih dalam perjuangan. Semangat kita pasti bisa melewati ini untuk sebuah gelar dan sejuta ilmu, aamiin.

Semoga bantuan, bimbingan dan petunjuk yang Bapak/Ibu dan rekan-rekan berikan menjadi amal ibadah dan mendapatkan balasan yang berlipat ganda dari Allah SWT. Penulis telah berusaha menulis semaksimal mungkin untuk skripsi ini, namun apabila pembaca masih menemukan kekurangan, maka penulis memohon adanya saran dan kritikan yang membangun dari pembaca untuk kesempurnaan skripsi ini. Penulis mengucapkan terimakasih, semoga skripsi ini bermanfaat bagi para pembaca pada umumnya dan khususnya bagi penulis, aamiin ya rabbal'alamin.

Padang, November 2022

Shufie Afira Putri

Daftar Isi

ABSTRAK.....	i
KATA PENGANTAR	ii
Daftar Isi	vi
Daftar Tabel	viii
Daftar Gambar	ix
BAB I.....	1
PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Identifikasi Masalah	8
C. Pembatasan Masalah	9
D. Rumusan Masalah	9
E. Tujuan Penelitian.....	10
F. Manfaat Penelitian.....	10
BAB II	12
TINJAUAN KEPUSTAKAAN.....	12
A. Kajian Teoritis.....	12
1. Konsep Kebijakan Publik	12
2. Konsep Implementasi Kebijakan.....	15
3. Konsep Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW)	22
4. Konsep Permukiman	26
B. Penelitian Yang Relevan	27
C. Kerangka Konseptual	32
BAB III	37
METODELOGI PENELITIAN.....	37
A. Jenis Penelitian.....	37
B. Fokus Penelitian	37
C. Lokasi Penelitian	38
D. Informan Penelitian	38
E. Jenis, Sumber, Teknik dan Alat Pengumpulan Data.....	39

F. Uji Keabsahan Data.....	42
G. Teknik Analisis Data.....	43
BAB IV.....	44
HASIL DAN PEMBAHASAN.....	44
A. Temuan Umum.....	44
1. Gambaran Umum Kecamatan Padang Timur.....	44
2. Visi dan Misi Kecamatan Padang Timur.....	48
3. Peta Wilayah Kecamatan Padang Timur Kota Padang.....	49
4. Struktur Organisasi Kecamatan Padang Timur.....	50
B. Temuan Khusus.....	51
C. Pembahasan.....	107
BAB V.....	117
PENUTUP.....	117
A. Kesimpulan.....	117
B. Saran.....	118
DAFTAR PUSTAKA.....	120
LAMPIRAN.....	125

Daftar Tabel

Tabel 3.1 Daftar Informan Penelitian	39
Tabel 4.1 Luas Setiap Kelurahan di Kecamatan Padang Timur	45
Tabel 4. 2 Jumlah Penduduk Kecamatan Padang Timur Menurut Kelurahan Tahun 2020	46

Daftar Gambar

Gambar 2.1 Model Marilee S. Grindle.....	24
Gambar 2.2 Kerangka konseptual	37
Gambar 4.1 Peta Wilayah Kecamatan Padang Timur	49
Gambar 4.2 Struktur Organisasi Kecamatan Padang Timur	50
Gambar 4.3 Sistem Informasi Manajemen Bangunan Gedung.....	57
Gambar 4.4 Rumah Yang Tidak Membuat Drainase	63
Gambar 4.5 Sampah di Bandar Kali Jati Kecamatan Padang Timur	66
Gambar 4.6 Karung Sampah dari DLH Tahun 2022	67
Gambar 4.7 Facebook Kecamatan Padang Timur	87

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Secara global, dunia menunjukkan fenomena bahwa peningkatan Pendapatan Domestik Bruto (PDB) bukan lagi memberikan cerminan terjadinya peningkatan pembangunan di suatu negara, bahkan saat ini dunia diresahkan dengan tingginya pertumbuhan jumlah penduduk yang berpengaruh terhadap ketersediaan lahan, kesenjangan sosial masyarakat, kriminalitas, merosotnya fungsi lingkungan, perubahan iklim, dan pemanasan global. Untuk mengatasi beragam masalah terutama masalah perkotaan dan dalam mewujudkan pembangunan berkelanjutan adalah perencanaan tata ruang. Perencanaan tata ruang adalah suatu bentuk kebijakan publik yang dapat mempengaruhi keberlanjutan proses pembangunan kota (Budihardjo dan Sudjarto, 2005:18) dalam (Adianti, 2020). Perencanaan tata ruang kota sebagai pengatur kualitas ruang agar sesuai dengan potensinya dan sebagai pengendali pertumbuhan dan perkembangan kota agar sesuai dengan daya dukungnya.

Adanya peningkatan jumlah penduduk menuntut setiap negara untuk siap memenuhi segala sarana dan pemenuhan hidup masyarakatnya baik perkotaan maupun perdesaan tidak terkecuali di Indonesia. Menurut Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (dalam Kemendagri, 2021), “Jumlah penduduk Indonesia per 30 Juni 2021 tercatat sebanyak

272,23 juta jiwa dengan rincian sebanyak 137,52 juta jiwa berjenis kelamin laki-laki dan sebanyak 134,71 juta jiwa berjenis kelamin perempuan.”

Melihat tingginya jumlah penduduk Indonesia, perencanaan tata ruang wilayah perkotaan harus lebih menjadi perhatian pemerintah. Tata ruang yang dinamis tetap memperhatikan terpeliharanya kelestarian lingkungan hidup sesuai dengan pembangunan yang berwawasan lingkungan yang berlandaskan pada Wawasan Nusantara dan Ketahanan Nasional sesuai Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang. Kota adalah pusat konsentrasi permukiman dan aktivitas penduduk. Sebagai pusat konsentrasi penduduk, maka kota menjadi pusat inovasi kehidupan di perkotaan. Kota berperan penting dan sangat dominan dalam penghidupan dan kehidupan masyarakatnya baik dalam kegiatan ekonomi, sosial, politik, maupun tatanan kebudayaannya.

Sebagai salah satu negara berkembang, Indonesia juga tengah menghadapi berbagai fenomena pembangunan baik nasional maupun daerah dalam pemerataan dan pertumbuhan. Pemerataan dan pertumbuhan adalah 2 (dua) aspek penting yang sejalan dengan proses pembangunan yang sedang dilakukan. Menurut Rustian Kamaluddin (1991) dalam (Eliza, 2013), bahwa kebijaksanaan nasional dalam pembangunan diarahkan untuk mencapai Trilogi Pembangunan, yaitu: (1) pemerataan pembangunan dan hasil-hasil yang menuju pada tercapainya keadilan sosial bagi seluruh rakyat, (2) pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi, dan (3) stabilitas nasional yang

sehat dan dinamis. Ketiga unsur Tripologi Pembangunan ini saling berkaitan dan saling memperkuat satu sama lain.

Dalam memenuhi kebutuhan dasar dan sebagai bentuk pembangunan berkelanjutan, diperlukan penataan ruang dan wilayah perkotaan terkhususnya pada daya dukung dan daya tampung lingkungan. Menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Bab 1 Pasal 1 menjelaskan bahwa Daya dukung lingkungan hidup adalah kemampuan lingkungan hidup untuk mendukung perikehidupan manusia, makhluk hidup lain, dan keseimbangan antar keduanya dan Daya tampung lingkungan hidup adalah kemampuan lingkungan hidup untuk menyerap zat, energi, dan/atau komponen lain yang masuk atau dimasukkan ke dalamnya.

Permasalahan yang umum terjadi di wilayah perkotaan tidak saja karena kota yang di bangun dan tumbuh secara alami, namun karena kota telah mengalami pertumbuhan yang pesat, bahkan lebih pesat daripada konsep tata ruang yang telah ditetapkan. Permasalahan penataan ruang dan wilayah terkhususnya pada daya dukung dan daya tampung lingkungan sudah menjadi masalah umum di berbagai kota-kota besar di Indonesia, seperti :

Pertama, di Kota Kediri, daya tampung untuk permukiman berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) sudah melewati batas karena peningkatan jumlah penduduk dan tidak diimbangi dengan ketersediaan lahan yang bersifat tetap. Maka perlu dilakukan pengkajian ulang mengenai lahan yang dialokasikan sebagai permukiman (Suharto dkk., 2018). Kedua, di Kota

Manado, kondisi eksisting pemanfaatan dan kapasitas lahan terpakai telah mengalami peningkatan. Akibat dari pertumbuhan penduduk dan terjadinya urbanisasi, sehingga berdampak pada kapasitas daya tampung lahan kawasan terencana dan bisa terjadi bencana alam (Pricylia, dkk 2018). Ketiga, di Kota Palu terjadinya pertumbuhan penduduk yang pesat pada tahun 2017 diikuti dengan peningkatan daya tampung lingkungan yang menyebabkan terjadinya bencana alam pada tahun 2018, berbagai penelitian mengidentifikasi bahwa peningkatan kerentanan masyarakat terhadap bencana merupakan imbas dari peningkatan populasi di daerah yang mengalami tekanan lingkungan dan rawan bencana (Santoso dkk., 2019).

Berkaitan dengan hal tersebut, Pemerintah Provinsi Sumatera Barat mengeluarkan regulasi yaitu Peraturan Daerah Pemerintah Provinsi Sumatera Barat Nomor 13 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2012-2032. Tujuan dikeluarkannya regulasi ini telah tercantum dalam Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 13 Tahun 2012, Bab I, Pasal 2 yaitu Tujuan penataan ruang wilayah adalah Terwujudnya Keterpaduan Pola Ruang Provinsi Tahun 2029 Melalui Pengembangan Potensi Sumber Daya Alam Dengan Tetap Memperhatikan Ekosistem Alam dan Daya Dukung Wilayah Secara Berkelanjutan. Yang dimaksud dengan "keberlanjutan" adalah bahwa penataan ruang diselenggarakan dengan menjamin kelestarian dan kelangsungan ekosistem alam dan daya dukung serta daya tampung wilayah dengan memperhatikan kelestarian fungsi dan keseimbangan lingkungan hidup, keanekaragaman

hayati serta kepentingan generasi masa yang akan datang. Salah satu kasusnya yaitu Kabupaten Tanah Datar yang mempunyai wilayah kemiringan lereng diatas 27% dan pertumbuhan penduduk pada periode 2000-2017 sebesar 1,2% per tahunnya. Pertumbuhan penduduk yang relatif tinggi berdampak pada daya lingkungan Kabupaten Tanah Datar karena masyarakat yang memanfaatkan SDA tidak memperhatikan daya lingkungannya (Umar, dkk 2017).

Begitu juga yang terjadi di Kota Padang, Kota Padang adalah salah satu kota di Indonesia yang mengalami kepadatan penduduk. Menurut Badan Statistik Sumatera Barat (2021), Kota Padang menjadi kota terpadat ke-1 di Sumatera Barat. Jumlah penduduk di Kota Padang pada tahun 2021 yaitu sebanyak 913.448 jiwa. Berdasarkan data tersebut, dapat disimpulkan bahwa Kota Padang telah mengalami pertumbuhan dan kepadatan penduduk yang pesat sekarang ini. Dalam hal ini, Pemerintah Kota Padang mengeluarkan Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 3 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah 2010-2030, sebagaimana yang tercantum pada Pasal 1 Ayat (33) yang menyatakan bahwa Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Padang yang selanjutnya disingkat RTRW Kota adalah rencana mengatur struktur dan pola pemanfaatan ruang wilayah kota yang merupakan hasil dari kegiatan perencanaan tata ruang. Tujuan Penataan Ruang Wilayah Kota Padang yang tercantum pada Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2012 dalam pasal 5 dengan tujuan mewujudkan Kota Padang sebagai kota metropolitan berbasis mitigasi

bencana dengan didukung oleh pengembangan sektor perdagangan, jasa, industri dan pariwisata.

Salah satu bentuk kebijakan Rencana Tata Ruang Wilayah yang telah termuat dalam Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Padang 2010-2030, Bab IV Pasal 6 poin f, meliputi:

f) pengembangan sistem permukiman yang sesuai dengan karakter ruang kota, sosial budaya masyarakat, daya dukung dan daya tampung lahan, kesesuaian lahan dan kerawanan terhadap bencana;

Melihat kondisi saat ini, penataan ruang di Kota Padang belum optimal dilihat dari pengembangan sistem permukiman yang sesuai dengan karakter ruang kota, sosial budaya masyarakat, daya dukung dan daya tampung lahan, kesesuaian lahan dan kerawanan terhadap bencana. Hal ini, dilihat dari berbagai permasalahan dibawah ini, seperti:

Pertama, kurang maksimalnya penataan kawasan di Kota Padang, seperti zona industri, zona pertanian, dan zona permukiman penduduk dapat menimbulkan masalah rentan di Kota Padang. Misalnya, belum optimalnya penataan zona pemukiman penduduk dan kawasan pemukiman kumuh yang berdampak kepada munculnya permasalahan banjir dan penyakit. Pertumbuhan penduduk juga merupakan faktor yang mendorong pertumbuhan permukiman. Akibat dari penataan pemukiman yang kurang menimbulkan permukiman kumuh seperti Sawahan Timur. Pernyataan ini didukung oleh temuan (Asmariati dkk., 2020) tingkat ke kumuhan Sawahan

Timur disebabkan karena rendahnya penataan pemukiman lahan penduduk, ini juga menyebabkan munculnya daerah kumuh di Sawahan Timur.

Kedua, kurangnya penataan pemukiman penduduk menyebabkan tidak terbendungnya arus urbanisasi se-Kota Padang. Dampak yang muncul berkaitan dengan penggunaan lahan yang tidak teratur dan berakibat pada penurunan kualitas lingkungan, sehingga daerah resapan air berkurang dan kondisi drainase perkotaan memburuk. Pernyataan ini didukung oleh Pengamat bidang Lingkungan Hidup Unand, Ardinis Arbain (2020), mengungkapkan bahwa salah satu penyebab banjir di Kota Padang ialah sistem tata aliran air yang belum optimal. Menurut BPBD Kota Padang (2021) tercatat ada 8 kecamatan di Kota Padang yang sering mengalami banjir, salah satu dari kecamatan tersebut adalah Kecamatan Padang Timur.

Ketiga, kurangnya penataan pemukiman penduduk di Kota Padang menyebabkan menurunnya daya dukung dan daya tampung lingkungan akibat kegiatan pembangunan. Contohnya pada Kelurahan Sawahan Timur. Seperti yang tertuang dalam SK Walikota No. 163 Tahun 2014 tentang Lokasi Lingkungan Perumahan dan Permukiman Kumuh Kota Padang. Tingkat kekumuhan Sawahan Timur adalah kumuh ringan dengan tipologi, yang juga disebabkan karena pertumbuhan penduduk yang tidak sejalan dengan perilaku masyarakat.

Keempat, kurangnya penataan pemukiman penduduk di Kota Padang pada aktivitas pembangunan di lereng bukit yang berdampak pada keselamatan penduduk. Salah satu contohnya yaitu pembangunan kampus

UIN III di Sungai Bangek, Kecamatan Koto Tengah, Kota Padang. Sisi positif dari adanya kampus UIN III di Sungai Bangek (2020) yaitu dapat meningkatkan perekonomian masyarakat. Meskipun pembangunan ini menuai dampak positif tetapi akan berisiko pada penduduk, seperti terkenanya longsor. Permasalahan ini dikemukakan oleh Staff Bidang Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan, Indra menyatakan pengembangan kawasan hunian di wilayah Timur Kota Padang berisiko karena daerahnya yang merupakan daerah tangkapan air, sehingga tidak bisa dikembangkan sepenuhnya menjadi kawasan terbangun.

Berdasarkan permasalahan diatas, saya tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul **Implementasi Kebijakan Pengembangan Permukiman Berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) di Kecamatan Padang Timur Kota Padang.**

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan pada Latar Belakang di atas dapat disimpulkan bahwa Identifikasi Masalahnya adalah:

1. Kurang maksimalnya penataan kawasan di Kota Padang.
2. Kurangnya penataan pemukiman penduduk menyebabkan tidak terbandungnya arus urbanisasi se-Kota Padang.
3. Kurangnya penataan pemukiman penduduk di Kota Padang menyebabkan menurunnya daya dukung dan daya tampung lingkungan.

4. Kurangnya penataan pemukiman penduduk di Kota Padang pada aktivitas pembangunan di lereng bukit yang berdampak pada keselamatan penduduk.

C. Pembatasan Masalah

Agar pembahasan penelitian ini lebih terfokus kepada permasalahan yang akan diteliti, maka penelitian ini dibatasi pada dua permasalahan: Pertama, kurang maksimalnya penataan kawasan di Kota Padang. Kedua, kurangnya penataan kawasan pemukiman penduduk di Kota Padang menyebabkan menurunnya daya dukung dan daya tampung lingkungan akibat kegiatan pembangunan.

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan batasan masalah diatas maka didapatkan rumusan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut: yang

1. Bagaimana implementasi Kebijakan Pengembangan Permukiman Berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) di Kecamatan Padang Timur Kota Padang?
2. Apa faktor pendukung dan faktor penghambat implementasi Kebijakan Pengembangan Permukiman Berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) di Kecamatan Padang Timur Kota Padang?

E. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui penyelenggaraan implementasi Kebijakan Pengembangan Permukiman Berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) di Kecamatan Padang Timur Kota Padang
2. Untuk mengetahui faktor pendukung dan faktor penghambat implementasi Kebijakan Pengembangan Permukiman Berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) di Kecamatan Padang Timur Kota Padang

F. Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian diatas, maka dapat ditarik manfaat penelitian sebagai berikut:

1. Secara Teoritis

Melalui penelitian ini, diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan ilmu konsep Administrasi Negara, khususnya Kebijakan Publik dan Perencanaan Pembangunan.

2. Secara Praktis

- a. Bagi Instansi

Diharapkan dapat memberikan kontribusi kepada Pemda dalam memecahkan masalah yang berkaitan dengan implementasi Kebijakan Pengembangan Permukiman Berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) di Kecamatan Padang Timur Kota Padang

b. Bagi Peneliti Lain

Penelitian ini dapat menjadi bahan rujukan bagi peneliti lain yang tertarik untuk melakukan penelitian dengan permasalahan implementasi Kebijakan Pengembangan Permukiman Berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) di Kecamatan Padang Timur Kota Padang